

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

Menurut Donaldson & Davis dalam Imam Ghozali, teori *stewardship* dicetuskan sebagai teori yang membahas tingkah laku dan premis. Teori ini mendefinisikan di mana sebuah perilaku manajer yang tidak memiliki kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan principal. Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Apabila terjadi ketidaksamaan kemauan antara *steward* dengan pemilik maka *steward* akan lebih memilih untuk bekerja sama dari pada menentang keinginan tersebut. Hal itu dikarenakan *steward* merasa mementingkan keinginan bersama lebih baik dan rasional untuk dapat mencapai tujuan organisasi bersama dibandingkan dengan keinginan pribadinya.<sup>1</sup>

Dalam teori ini manajer akan berusaha untuk menjaga kepercayaan publik, sebagaimana asumsi dalam teori ini manajer agar berusaha dengan maksimal untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan sebuah organisasi dengan menjalankan pekerjaan secara maksimal dan berpemikiran untuk menjadikan sebuah organisasi menjadi kuat dengan ekonomi dan kredibilitas yang tinggi.<sup>2</sup>

Teori *stewardship* telah dipakai pada penelitian-penelitian akuntansi sektor publik seperti pada organisasi pemerintahan serta organisasi non profit lain yang sejenis. semakin kompleknya transaksi-transaksi yang terdapat pada akuntansi diikuti dengan pertumbuhan spesialisasi akuntansi yang semakin berkembang membuat teori dan pemahaman ini banyak diterapkan. Teori ini diciptakan untuk membantu pemimpin menghasilkan kepercayaan interpersonal dan institusional agar dapat mencapai kinerja yang tinggi bagi kepentingan organisasi, menurut harnandez dalam Riny Jefri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Ghozali, *25 Grand Theory 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* (semarang ;yogya Pratama,2020): 25-28.

<sup>2</sup> Jefri and Makassar, "Teori Stewardship Dan Good Governance."

<sup>3</sup> Jefri and Makassar.

Teori *stewardsip* menggambarkan tentang kepuasan suatu organisasi yang ditinjau dari segi asumsi filosofis seorang individu dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi pada sebuah organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku (*steward*) dan rakyat selaku (*principal*) dimana pemerintah sebagai pemegang amanah dan masyarakat sebagai pemberi amanah berjalan berdasarkan kepercayaan dan kolektif sesuai tujuan organisasi. Dengan demikian teori ini berpandangan bahwa setiap manajemen harus dapat dipercaya dengan bertindak baik sepenuhnya bagi kepentingan publik. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bertanggungjawab atas segala aktivitas yang telah dijalankan merupakan salah satu dari banyaknya tujuan organisasi sektor publik.<sup>4</sup>

Salah satu dari banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan pemerintah desa selaku (*Steward*) kepada masyarakat adalah pertanggungjawaban laporan keuangan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dibutuhkan laporan keuangan yang baik pula. Pemerintah desa harus dapat mengungkapkan hal hal yang perlu di ungkapkan dalam laporan keuangan secara jelas, jujur, relevan, dan dapat diandalkan. Sehingga masyarakat sebagai *principal* dan pihak pihak yang membutuhkan informasi dapat memahami dengan baik isi laporan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan.<sup>5</sup>

Melalui teori *Stewardship* penelitian ini dapat memaparkan bagaimana pihak pemerintahan desa bertindak baik dengan bertanggungjawab dapat menyajikan laporan keuangan secara jujur, jelas, rinci, relevan, dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang andal akan menjadi

---

<sup>4</sup> Robertus M. Bambang Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance) Konsep Dan Penerapannya* (Jawa Barat: PT Raja Grafindo Persada, 2021):52.

<sup>5</sup> Dito Aditia Darma Nasution, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara," *Prosiding Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharmawangsa* 1, no. 1 (2022): 72–77, <https://doi.org/10.46576/prosfeb.v1i1.39>.

informasi yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta masyarakat sehingga dapat menjaga eksistensi pemerintahan menjadi Lembaga yang dapat dipercaya dan dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik.<sup>6</sup>

## 1. Keterandalan Laporan Keuangan

### a. Laporan Keuangan

Menurut Wastman Wahyu “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu organisasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kinerja keuangan suatu organisasi maupun sebagai alat memperoleh informasi dan alat pengambilan keputusan bagi setiap individu yang membutuhkan”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Hery laporan keuangan (*Financial Statements*) merupakan serangkaian kegiatan akhir dari proses-proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi yang ada.<sup>8</sup>

Mengacu terhadap konsep laporan keuangan, laporan keuangan sangat dibutuhkan sebagai alat pengukur tingkat kinerja suatu instansi dari waktu ke waktu sehingga mengetahui seberapa jauh suatu instansi mencapai tujuannya. Selain itu laporan keuangan juga dijadikan sebagai alat berinteraksi antara pihak pembuat laporan dan pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkan hasil laporan keuangan, olehkarena itu laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting dan luas sehingga dapat mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan.<sup>9</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa “laporan keuangan merupakan serangkaian laporan yang disajikan secara struktur

---

<sup>6</sup> Jefri and Makassar, “Teori Stewardship Dan Good Governance.” *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 003 (2018): 14–28

<sup>7</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018): 2-4.

<sup>8</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021): 1-28.

<sup>9</sup> Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*.

mengenai posisi keuangan serta kegiatan-kegiatan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode tertentu. Serta dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sehingga dapat menambah kepatuhan terhadap peraturan undang-undang”.<sup>10</sup>

#### **b. Laporan Keuangan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berhak untuk dapat mengatur dan mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Pengelolaan keuangan desa dijalankan dengan masa kurun waktu mulai dari 1 Januari sampai dengan 1 Desember. Dimana kepala desa bertugas sebagai penyampai hasil laporan keuangan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota tiap per enam bulan tahun berjalan.<sup>11</sup>

Laporan keuangan desa wajib disediakan dan disusun oleh pemerintah diantaranya mengenai realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sehingga dengan adanya laporan tersebut dapat dijadikan acuan dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan penilaian kinerja pemerintahan lainnya.<sup>12</sup>

Pedoman pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri Nomer 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam menyajikan laporan keuangan aparatur desa harus berpegang dengan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif,

---

<sup>10</sup> “Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengembangan Dan Penetapan Rincian Dana Desa” (2010).

<sup>11</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>12</sup> Diah Aryanti et al., “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten),” *BBisman* 2, no. 1 (2019): 28.

serta dilakukan dengan terrib dan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>13</sup> Transparan artinya harus bersifat terbuka bagi siapa saja yang berkepentingan termasuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara luas, benar, jujur, dan tidak di diskriminatif. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan legal, dan partisipasif artinya terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Serta tertib dan sesuai kaidah artinya pelaporan keuangan harus sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Pada umumnya laporan keuangan desa lebih bersifat sederhana dibandingkan dengan laporan keuangan daerah, meskipun sederhana namun desa tetap dituntut menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal karena salah satu pencapaian visi dan misi desa dapat dilihat melalui laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dengan mudah diakses masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi hasil kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu teknis penguasaan dan pemahaman mengenai tahap pelaporan keuangan yang baik harus dimiliki aparatur desa sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan pedoman pemerintahan desa dan standar penyusunan laporan keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan desa terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Yesi Mutia Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2018): 33.

<sup>14</sup> Aprina Nugrahesthy et al., "Sudahkah Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi* 7, no. 1 (2022): 12–13.

<sup>15</sup> Tika Andriani Lulu Amalia Nusron, "Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Laporan Keuangan DESa Di Kecamatan Ajibarang," *Journal of Accounting And Financial Issue* 2, no. 2 (2021): 16.

1. Laporan mengenai Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Laporan Realisasi Kegiatan yang terselenggara di Desa.
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
5. Laporan Kekayaan milik Desa.
6. Catatan Atas Laporan Keuangan.<sup>16</sup>

### c. Laporan Keuangan Andal Menurut Prespektif Islam

Praktik sistem keuangan syariah telah lahir sejak zaman kejayaan Islam. Teori akuntansi syariah menjadi bagian yang terpenting bagi praktek akuntansi syariah sebagai landasan pemahaman yang benar untuk mendorong menuju praktik akuntansi yang sesuai. Akuntansi menjadi sebuah pegangan bagi para pengambil keputusan baik individu maupun pemerintahan guna menjalankan roda ekonomi dan sosial yang baik. sebagai salah satu aspek terpenting bagi suatu entitas adalah keuangan dan pelaporan keuangan.<sup>17</sup>

Islam telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan bagi seluruh umatnya yang melakukan transaksi baik berupa utang piutang maupun jual beli secara tunai.<sup>18</sup> Pentingnya pencatatan atas transaksi tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi<sup>19</sup>:

---

<sup>16</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” n.d.

<sup>17</sup> Rahmat Ilyas, “Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 209–21.

<sup>18</sup> Siti Asiam, “Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 128–36, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5719](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5719).

<sup>19</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 20, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran,2001).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ  
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ  
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ  
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Laporan keuangan adalah proses akhir dari akuntansi, agar laporan yang dihasilkan dapat

bermanfaat bagi seluruh penggunanya maka dalam pembuatannya harus didasari dan mengacu dengan standar akuntansi yang berlaku. Setiap negara tentu memiliki perberbeda mengenai standar tergantung dari kondisi hukum, lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi pada tiap negara.<sup>20</sup>

Laporan keuangan menjadi media informasi bagi sebuah entitas pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terutama keuangan kepada publik. Oleh karena itu pemerintahan harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan andal dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten dibidangnya salah satunya Pendidikan.<sup>21</sup> Seperti sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (Shahih Bukhari) dari Abu Khurairah. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البخاري)

Artinya:

“Ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari).

Dari hadist tersebut dapat kita ketahui bahwa apabila suatu pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya maka kehancuranlah yang akan diperoleh. Begitupula dengan penyajian laporan keuangan apabila tidak dibuat oleh orang yang berkompeten maka akan terjadi kecurangan dan tidak berkualitas suatu laporan keuangan yang tentunya akan berpengaruh pada seluruh entitas pemerintahan.

---

<sup>20</sup> Sri Rahmany and Fatimah, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis),” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 110–23.

<sup>21</sup> Siti Asiam, “Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 128–36.

Pelaporan keuangan dalam Islam harus disusun berdasarkan dengan prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dikarenakan laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi banyak pihak baik internal maupun eksternal. Keadilan dan kejujuran merupakan prinsip yang erat dalam ajaran islam. Dalam etika penyusunan laporan keuangan sendiri setiap hal yang dilakukan dalam kebijakan harus memiliki dampak yang baik bagi seluruh pihak yang ada. Sehingga dengan adanya laporan keuangan akan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga dan pihak pihak yang membutuhkan lainnya.<sup>22</sup>

#### **d. Karakteristik Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi yang andal dan relevan terkait dengan kinerja pemerintahan maupun posisi keuangan pada suatu periode tertentu beserta perkembangannya. Karena dengan terbentuknya laporan keuangan yang relevan dan andal akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat dievaluasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif dengan ukuran-ukuran normatif yang harus dipenuhi dalam informasi akuntansi, hal tersebut tertera dalam standar akuntansi pemerintahan RI Nomer 71 Tahun 2010. Karakteristik tersebut merupakan syarat untuk terpenuhinya laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas. Dalam PP Nomer 71 Tahun 2010 ini juga menjelaskan bahwa indikator dan karakteristik keterandalan laporan keuangan sama diantaranya yaitu adalah andal, dapat dibandingkan, relevan dan bisa dipahami.<sup>23</sup>

##### **1. Relevan**

Suatu laporan keuangan dapat dinyatakan relevan apabila informasi-informasi yang termuat di

---

<sup>22</sup> Rifqah Alfyyah et al., "Kajian Etika Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Maqasidu Syariah," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3, no. 1 (2022): 164.

<sup>23</sup> "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan."

dalamnya dapat menjadi sebuah alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk laporan keuangan yang relevan.

Laporan keuangan pemerintahan harus mampu memberikan manfaat umpan balik agar pengguna laporan nantinya dapat mengakses dan mengevaluasi laporan keuangan di masa lalu. Selain itu laporan keuangan juga harus memiliki manfaat prediktif seperti memuat informasi yang menjadikan pengguna laporan keuangan dapat memprediksi situasi yang akan datang berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut.<sup>24</sup>

Tepat waktu dan lengkap juga menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk menjadikan laporan keuangan pemerintahan yang relevan. Artinya laporan yang dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan adalah laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu. Selain itu laporan keuangan juga harus disajikan secara lengkap dengan memuat seluruh informasi yang ada dan mencakup keseluruhan informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi saat pengambilan keputusan.<sup>25</sup>

## 2. Andal

Laporan keuangan pemerintahan dapat dikatakan andal apabila informasi yang terkandung pada isinya terbebas dari pengertian menyesatkan dan salah saji material. Informasi yang disajikan bisa saja relevan namun apabila tidak andal, laporan keuangan dapat menyesatkan penggunanya. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dicapai agar laporan keuangan dapat dikatakan andal.

Yang pertama yaitu jujur, setiap hal yang disajikan harus secara jujur dalam setiap transaksi apapun dan disajikan secara wajar. Dapat

---

<sup>24</sup> Dito Aditia Darma Nasution et al., *Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Bala (Kecamatan Datuk Bandar)* (jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

<sup>25</sup> Syahril Effendi, *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD(PPKD)* (jakarta: Erlangga, 2021):12-13.

diverifikasi dengan arti laporan keuangan dapat di uji dari pihak manapun dengan hasil simpulan yang tidak jauh berbeda. Selain itu laporan keuangan harus bersifat netralitas atau dapat diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada salah satu pihak saja.<sup>26</sup>

### 3. Dapat Di bandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan entitas sejenis lainnya atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan hanya dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Baik secara internal dan external entitas hanya boleh membandingkan jika penerapan akuntansi yang diterapkan sama dari tahun ke tahun.

### 4. Dapat dipahami

Dikarenakan laporan keuangan hal yang dapat digunakan dalam berbagai aspek organisasi, hal tersebut menjadikan laporan keuangan harus dapat dipahami oleh keseluruhan anggota yang terlibat. Kepahaman tersebut harus didasari dengan pengetahuan yang mencukupi sehingga dapat terhindar dari kesalah pahaman laporan yang telah disajikan.<sup>27</sup>

## e. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Dalam hal pembuatan laporan keuangan pada tingkat pemerintahan khususnya juga memiliki fungsi dan tujuan kenapa diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dan andal sebagai berikut:

### 1. Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan yang dimaksud dalam point ini adalah sebagai bukti dan bentuk pertanggung jawaban kepada otoritas maupun pihak pengguna laporan keuangan yang bersangkutan bahwa telah

---

<sup>26</sup> Effendi, syahril, "*Akuntansi Keuangan SKPD SKKPKD (PPKD)*", (Jakarta:Erlangga, 2021) hlm 12 .

<sup>27</sup> Kusumadewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Lporan Keuangan Desa(Studi Pada Perangkat Desa Se-Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)."

memaksimalkan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan dalam hal ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Yang mana dijadikan sebagai alat untuk memonitoring kinerja pemerintahan serta mengevaluasi dan mengamati dari waktu ke waktu atas capaian dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan disini juga berfungsi sebagai salah satu alat informasi bagi pihak luar yang membutuhkan sehingga mereka dapat menilai keefektifitasan dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi yang ada.<sup>29</sup>

3. Perencanaan dan Informasi Otoritasi

Dalam hal ini pelaporan keuangan digunakan sebagai alat yang dapat memberikan landasan bagi perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Selain itu dalam hal ini laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan disini dapat membantu pembaca yang membutuhkan kepentingan-kepentingan tertentu untuk memantau setiap unit kerja maupun organisasi guna memastikan apakah masih dapat menyediakan layanan baik jasa maupun barang di tahun-tahun mendatang.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan dalam hal ini berfungsi guna memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menanyakan atas apa yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh masyarakat dan juga sebagai alat komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2018): 83.

<sup>29</sup> Isma Ardilina et al., "Evaluasi Penerapan Ganti Uang Di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 3 (2018): 391.

## 6. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi lebih mendalam mengenai suatu organisasi atau instansi.<sup>30</sup>

## 2. Kompetensi Akuntansi

Pengertian kompetensi berasal dari Bahasa Yunani *Competency* yang memiliki arti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi adalah tingkat kinerja yang ditunjukkan melalui penerapan pengetahuan, keterampilan, dan manajemen yang efektif. Menurut McShane dan Glinow dalam Musa Yosep dan Dewi Indriasih kompetensi menjadi bagian dari salah satu karakteristik seseorang yang dapat mencerminkan perilaku serta pola pikir secara periode yang cukup lama. Kompetensi dapat diwujudkan melalui kepemilikan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan unggul maka seseorang memerlukan kompetensi yang harus dimiliki guna mendukung kinerjanya secara konsisten.<sup>31</sup>

Pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk suatu transaksi menjadi laporan keuangan. Proses akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi suatu kejadian ekonomi dan transaksi yang mempengaruhi utang, modal, pendapatan, serta beban yang dilakukan dengan berpedoman pada suatu prosedur dan aturan yang berlaku. Akuntansi merupakan sebuah pengklasifikasian atas transaksi transaksi yang kemudian di jurnal sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Elfita Yenni et al., "Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru)," *Research In Accounting Journal*, vol. 1, 2019, <http://journal.yrpioku.com/index.php/raj>.

<sup>31</sup> Musa Yosep and Dewi Indriasih, *Kualitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Pada Entitas Sektor Publik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020):2-16.

<sup>32</sup> Yulyanah and Hidayatul Mu'arifin, *Akuntansi Berbasis Kompetensi* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021):2.

Menurut Hervesi Dalam Ade Husna kompetensi akuntansi merupakan suatu ciri dari seseorang yang dapat ditinjau dan dilihat dari keterampilannya, *knowledge* dan *abilities* yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan profesi akuntansi menurut *International Federation Of Accountants* adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, akuntan intern baik yang bekerja di bidang industri keuangan maupun pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi akuntansi merupakan sebuah penguasaan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk dapat menunjang pekerjaannya sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.<sup>33</sup>

Menurut harvesi Dalam Nada Irma Farida terdapat beberapa indikator kompetensi akuntansi seperti:

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan dalam hal ini merupakan sebuah informasi yang diperoleh untuk mendukung segala proses aktivitas yang dilakukan. Misalnya seorang perangkat harus memiliki pengetahuan sekurang-kurangnya mengenai proses penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah yang ada sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang andal.

2) Kemampuan (*Skill*)

Kemampuan atau Skill adalah sesuatu yang dimiliki seseorang selayaknya keterampilan untuk mendukung dan mempermudah aktivitas yang dijalankan. Selain pengetahuan, hal penting yang harus dimiliki seseorang dalam menyajikan laporan yang baik dan benar adalah memiliki kemampuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ade Husna et al, “ Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten aceh Besar ” , Serambi Konstruktivis 4, no.2 (2022) : 207

<sup>34</sup> Nada Irma Farida et al., “Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi, Supervision, Accountability, Dan Transparency Terhadap Potensi

### 3) Perilaku individu (*Attitude*)

Sikap seseorang yang dapat mendukung karakter seseorang berada pada lingkungan tertentu disebut *Attitude*. Perilaku dalam hal ini dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Perangkat Desa yang baik harus memiliki tanggung jawab untuk dapat menyajikan sebuah aktivitas dengan penilaian yang jujur dan akurat tentang kesehatan keuangan suatu entitas dan kepada masyarakat umum. Hal tersebut tentunya dapat didukung dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang terutama bagian keuangan. Semakin ketatnya pengawasan langsung oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) membuat desa harus mampu membangun pengelolaan keuangan yang baik dan benar yang nantinya profesi akuntansi akan sangat berperan.<sup>35</sup>

Apabila suatu desa belum memahami secara keseluruhan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan yang baik sesuai dengan kaidah pelaporan, menutup kemungkinan akan terjadi kesalahfahaman antara pihak penyaji dan pemeriksa laporan yang tentunya akan menjadikan bumerang bagi pihak desa. Laporan keuangan desa sendiri seharusnya sudah disusun berdasarkan dengan pedoman standar akuntansi yang berlaku. Apabila para perangkat desa belum dan kurang menguasai mengenai kompetensi akuntansi yang berlaku dalam proses penyajian laporan keuangan tentu akan menjadi sebuah masalah. Dengan adanya kemampuan perangkat yang berkompeten dan dapat memahami logika akuntansi

---

*Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Sejumlah Desa Di Kabupaten Purworejo),* " *Jurnal Of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 2, no. 2 (2021): 246–66.

<sup>35</sup> Zaizah Wiet Rifandi, "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)," *Riset Akuntansi Tritayasa* 4, no. 1 (2019): 3.

dengan baik maka akan berperan penting dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan andal.<sup>36</sup>

### 3. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Tujuan utama peluncuran sistem ini adalah untuk mempermudah proses pelaporan keuangan di tingkat desa. Menurut Delone dan McLean (Dalam sigit kurnianto dkk ) menjelaskan bahwa suatu sistem informasi dapat dikatakan berhasil apabila sistem tersebut dapat mencapai kepuasan tujuan dalam penggunaannya, sehingga dengan adanya suatu sistem informasi tersebut dapat membuat individu lebih produktif dan dapat mencapai tujuan organisasinya.<sup>37</sup>

Sistem keuangan desa diharapkan mampu menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan seperti Laporan Realisasi, APB Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dokumen penatausahaan keuangan desa, dan pelaporan kekayaan milik desa lainnya. Fitur-fitur yang tersedia dalam sistem keuangan desa dibuat sederhana mungkin disertai dengan petunjuk penggunaan dan pelaksanaan tata Kelola keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah desa khususnya bagian keuangan untuk mencapai akuntabilitas dan mengelola keuangan desa. Dengan penggunaan sistem yang terintegritas dan terkomputerisasi diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan dan tindak penyimpangan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sri Ayem, "Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kebumen)."

<sup>37</sup> Sigit Kurnianto et al., "Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 4, no. 2 (2019).

<sup>38</sup> Mufti arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (2020): 67–82.

Menurut Delone dan McLean Dalam Sigit Kurnianto dkk terdapat beberapa indikator dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di antaranya yaitu:

- 1) Sistem kualitas  
Suatu sistem mutu atau kualitas yang dapat digunakan untuk menjamin kesesuaian dari proses yang dihasilkan dalam bentuk produk maupun layanan.
- 2) Kualitas informasi  
Informasi dapat dikatakan berkualitas bilamana secara konsisten dapat memenuhi suatu persyaratan organisasi sesuai dengan harapan yang membutuhkan informasi tersebut.
- 3) Kepuasan penggunaan  
Sejauh mana hasil yang diberikan oleh sistem informasi tersebut dengan perbandingan antara harapan dengan kesesuaian hasil penggunaan tersebut dengan memberikan hasil yang nyata yang diperoleh dari sistem tersebut.
- 4) Dampak individu  
Sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan dampak dan perubahan yang positif bagi setiap individu yang menjalankan.
- 5) Dampak organisasi<sup>39</sup>  
Sejauh mana sistem informasi tersebut mampu memberikan dampak terhadap kepuasan dan keberhasilan suatu organisasi.

Sebelum diluncurkannya SISKEUDES pemerintah desa masih melaporkan keuangan desanya secara sederhana dengan menggunakan Excel, dengan banyaknya format yang masih belum tepat membuat pemerintah kabupaten sulit untuk menjalankan proses evaluasi terhadap laporan keuangan desa. Sehingga dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa diharapkan mampu membantu pemerintahan mengatur dan mengelola keuangan secara tersistem dengan baik dan dapat membuat

---

<sup>39</sup> Kurnianto et al., "Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean."

dokumen pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para penyaji laporan keuangan desa.<sup>40</sup>

Dampak lain yang dapat dirasakan dari adanya Sistem Keuangan Desa ini adalah dapat memberikan motivasi kinerja yang baik dan benar berkaitan dengan kegiatan operasional yang berjalan lebih administratif dan teratur sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan, mengoptimalkan kinerja pegawai, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa yang andal. Selain itu adanya sistem ini juga dapat memberikan perubahan terhadap pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari banyaknya hal-hal positif dan manfaat yang ditimbulkan oleh adanya peluncuran aplikasi ini, membuat pentingnya peranan SISKEUDES untuk diterapkan dipemerintahan desa.<sup>41</sup>

#### 4. Pelatihan Laporan Keuangan

Menurut Hariandja (dalam Dini Budiarti dkk) pelatihan merupakan sarana yang dapat dilakukan guna meningkatkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu pelatihan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dilakukan guna menunjang peningkatan sumber daya manusia seperti dapat meningkatkan kualitas pemahaman pegawai yang belum memahami sepenuhnya menjalankan pekerjaan yang baik dan benar, serta dapat meningkatkan daya saing dan menyesuaikan terhadap peraturan-peraturan pemerintahan yang ada.<sup>42</sup>

Muzahid Dalam Luh Sukriani dkk mengartikan pelatihan merupakan sebuah proses Pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir dengan baik dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam proses memperoleh skill dan

---

<sup>40</sup> Arif Rivian and Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa *Application of Village Financial System in Village Financial Management*," *Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 94.

<sup>41</sup> Rita Martini et al., "Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 25, no. 2 (2019): 70.

<sup>42</sup> Dini Budiarti et al., "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) Effect," *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* 1, no. 1 (2021): 15.

pengetahuan, sehingga dapat tercipta bakat yang dapat mengembangkan keterampilan maupun kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.<sup>43</sup>

Seiring dengan berkembangnya waktu, desa mendapat banyak tuntutan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan andal, dengan adanya system baru yang dihadirkan oleh BPKP tentunya perangkat desa memerlukan adaptasi dalam menjalankan aplikasi tersebut. Oleh karena itu adanya pelatihan sangat diperlukan guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan aparat desa khususnya bagian keuangan dalam pengelolaan akuntansi keuangan desa. Terdapat banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya pelatihan ini, diantaranya yaitu:

- a. Dengan adanya pelatihan masyarakat akan menjadi lebih percaya dengan kemampuan yang dimiliki perangkat desa.
- b. Dengan adanya pelatihan akan dapat terjalin adanya kerjasama yang lebih erat sehingga dapat menguntungkan banyak pihak.
- c. Dapat memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat karena penyaji laporan keuangan desa sudah terlatih dan handal.<sup>44</sup>

Menurut Muzahid terdapat beberapa indikator pelatihan Laporan Keuangan seperti:

- 1) Bidang Pelatihan  
Kegiatan pelatihan apa yang diselenggarakan dan diikuti oleh seseorang guna menunjang skill yang dimilikinya.

---

<sup>43</sup> Luh Sukriani et al., “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 9, no. 3 (2018): 85–97.

<sup>44</sup> Demak Johanna Gurning et al., “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Di Desa Wisata Kecamatan Hariara Pohan, Samosir,” *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (July 23, 2022): 806–12, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.2014>.

- 2) Kualitas pelatihan  
Sejauh mana pelatihan tersebut dapat membantu memberikan pemahaman dan membantu terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dijalankan.
- 3) Jangka waktu pelatihan  
Berapa lama proses pelatihan diselenggarakan dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan keterandalan laporan keuangan di antaranya adalah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No .	Peneliti Tahun, dan Judul.	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alvina Ghina Riyanita dan Harjanti Widiastuti.  Jurnal Akuntansi Bisnis tahun 2020  Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan Dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Sedangkan untuk pelatihan yang diikuti	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvin Ghina dkk, terlatak pada variabel pelatihan.	1. Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti sebelumnya menggunakan variabel sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi sedangkan penelitian

	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kabupaten Sleman)</p>	<p>oleh pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan.</p>		<p>ini menggunakan variabel kompetensi akuntansi, dan variabel penerapan sistem keuangan desa.</p> <p>2. Perbedaan kedua terletak dalam objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Alvina ghina Riyanita dan Harjanti Widiastuti berobjek di kabupaten Sleman sedangkan objek penelitian ini seluruh Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.</p>
2.	<p>Sri Ayem dan Husni</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan</p>	<p>Terdapat kesamaan antara</p>	<p>1. Terdapat perbedaan antara</p>

	<p>Rofikoh</p> <p>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Tahun 2020</p> <p>Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Sistem informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen)</p>	<p>bahwa “kompetensi akuntansi dan pemahaman undang-undang nomer 6 tahun 2014 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa”. Selain itu system informasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.</p>	<p>penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Husni Rofikoh dimana sama sama menggunakan variabel bebas yaitu kompetensi akuntansi.</p>	<p>penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel pemahaman undang-undang nomer 6 tahun 2014, sistem informasi, dan pengendalian internal. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDS) dan variabel keikutsertaan pelatihan.</p> <p>3. Perbedaan kedua terletak dalam objek penelitian. Objek</p>
--	---	---	--	---

				<p>penelitian terdahulu berada di kabupaten Kebumen sedangkan objek penelitian ini seluruh Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.</p>
4.	<p>Teguh Erawati dan Antonius Sahaduta Hamanay</p> <p>Jurnal Akuntansi Tahun 2022</p> <p>Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem</p>	<p>Penelitian menunjukan hasil dari 4 Variabel independent yaitu “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p>	<p>Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Antonius Sahaduta Hamanay, dimana sama-sama menggunakan variabel penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDE S)</p>	<p>1. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian Internal, dan Transparansi. Sedangkan penelitian ini menggunakan</p>

	Pengendalian Intern, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	desa”.		n variabel Kompetensi Akuntansi dan variabel keikutsertaan pelatihan. 2. Perbedaan kedua terletak dalam objek penelitian. Penelitian terdahulu ber objek di pemerintah desa kecamatan Pakem. sedangkan objek penelitian ini seluruh Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
5.	Kadek Ayu Indrayani, dan Desak Nyoman Werastuti.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa akuntansi) Universitas	Hasil penelitian menunjukan bahwa ke 3 variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Ayu dan Nyoman Werastuti terletak pada variabel	1. Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti sebelumnya menggunakan

	<p>b Pendidikan Ganesha Tahun 2021</p> <p>Pengaruh Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Desa.</p>	<p>yaitu kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi.</p>	<p>pelatihan.</p>	<p>n variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel kompetensi akuntansi, dan variabel penerapan sistem keuangan desa.</p> <p>2. Perbedaan kedua terletak dalam objek penelitian. Penelitian terdahulu berobjek di Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng, sedangkan objek penelitian ini seluruh Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.</p>
--	---	--	-------------------	---

<p>6.</p>	<p>Sri Dewi Anggadini Vira Mutiara Subekti Sri Damayanti Egi Fahrana</p> <p>Jurnal : Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise</p> <p>Keterandalan Laporan Keuangan : Dampak dari Kualitas SDM dan Teknologi Informasi.</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa “dampak kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan”.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini dkk dengan penelitian ini sama sama membahas mengenai faktor keterandalan laporan keuangan</p>	<p>1. Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti sebelumnya menggunakan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel kompetensi akuntansi, dan variabel penerapan sistem keuangan desa.</p> <p>2. Perbedaan kedua terletak dalam objek penelitian. Penelitian terdahulu ber objek di</p>
-----------	---	---	---	--

				Pemerintah Daerah Badung, sedangkan objek penelitian ini seluruh Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
7.	<p>Efvy Zamidra Zam</p> <p>Jurnal Economics, Businnes, Managemen, &amp; Accounting 2021</p> <p>Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber daya Manusia Terhadap Keandalan Pelaporan</p>	<p>Dari hasil penelitian tersebut “variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan desa”.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Efvy Zamidra Zam dengan penelitian ini sama sama membahas mengenai faktor keterandalan laporan keuangan desa</p>	<p>1. Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti sebelumnya menggunakan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel kompetensi akuntansi, dan variabel</p>

	Keuangan Desa			<p>penerapan sistem keuangan desa.</p> <p>2. Perbedaan kedua terletak dalam objek penelitian. Penelitian terdahulu berobjek di kabupaten Kebumen sedangkan objek penelitian ini seluruh Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.</p>
--	------------------	--	--	--

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu menandakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan. Namun diantara banyaknya variabel tersebut variabel kompetensi akuntansi dan penggunaan sistem keuangan desa merupakan variabel yang banyak berpengaruh. Karna dengan adanya kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan mudah untuk dapat menginput laporan laporan yang harus dilaporkan dalam sistem sehingga dapat menjadikan semakin berkualitas laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas belum banyak peneliti yang mengkombinasikan antara variabel kompetensi akuntansi, penggunaan Sistem Keuangan Desa, serta Keikutsertaan Pelatihan. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik dan mencoba untuk menggunakan variabel-variabel tersebut untuk

mengetahui pengaruhnya terhadap keterandalan laporan keuangan desa.

### C. Kerangka Berfikir

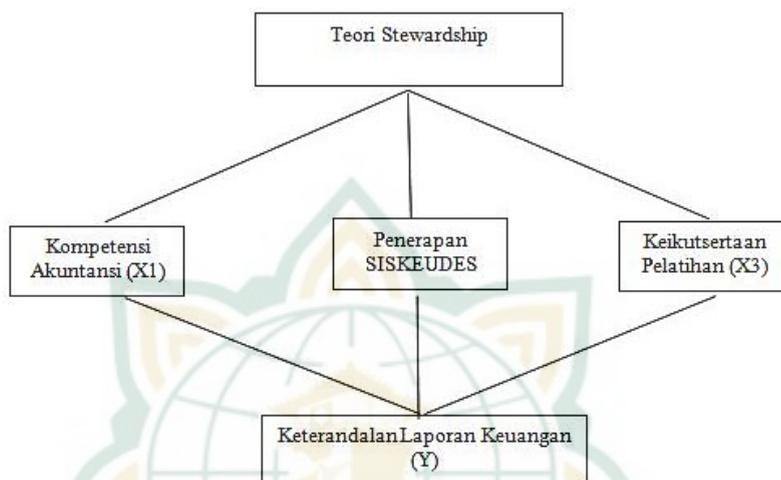
Teori *stewardship* menggambarkan tentang situasi dimana para pihak manajemen berfokus untuk memikirkan tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori ini beranggapan bahwa para eksekutif lebih cenderung memprioritaskan untuk bertindak dalam kepentingan mayoritas anggota dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri. Melalui teori ini, pemerintah dapat berlaku sebagai *steward* penerima amanah yang tertuntut untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas bagi para instansi maupun organisasi serta para pengguna informasi keuangan desa sebagai salah satu bentuk mewujudkan pelaksanaan *good corporate governance*. Dengan terbentuknya laporan keuangan yang baik dan andal menjadi salah satu bentuk menjaga kepercayaan masyarakat maupun pemerintah pusat mengenai pengelolaan dana sehingga dapat terjaga eksistensi pemerintahan menjadi lembaga yang dapat dipercaya, menjaga amanah dan aspirasi masyarakat.<sup>45</sup> Oleh karena itu faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan diantaranya yaitu kompetensi akuntansi, penerapan SISKEUDES, keikutsertaan pelatihan.

Untuk dapat memperjelas mengenai arah dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukannya sebuah konsep berpikir yang dapat digunakan untuk menguraikan arah dan tujuan penelitian serta permasalahan pada penelitian ini :

---

<sup>45</sup> Imam Ghozali, *25 Grand Theory 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## D. Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh Kompetensi Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk dapat menyajikan laporan keuangan Desa kepada masyarakat. Berdasarkan teori *stewardship* untuk mendapatkan kepercayaan publik maka pemerintah selaku *steward* harus dapat memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki secara maksimal agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berlaku yaitu relevan, andal, dan dapat dibandingkan, maka seorang perangkat yang bertugas menyajikan harus memiliki sebuah kompetensi akuntansi guna memahami alur dan proses pencatatan yang baik dan benar.<sup>46</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Husni Rofikoh menunjukkan bahwa “kompetensi

<sup>46</sup> Rindiyan Abdullah et al., “Pentingnya Profesi Akuntan Dalam Pengembangan Laporan Keuangan Desa,” n.d., <https://doi.org/10.46306/vls.v1i2>.

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan desa”.<sup>47</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfatus Zahroh mengutarakan bahwa “kompetensi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa”.<sup>48</sup> Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh Sholeh yang menyatakan bahwa Kompetensi Akuntansi Pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Ramadhani juga menyatakan bahwa kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>49</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan maka dirumuskan hipotesis:

**H1: Kompetensi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Desa.**

## **2. Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desain guna membantu proses pertanggungjawaban kemana uang atau dana desa digunakan. Teori *Stewardship* menggambarkan hubungan mengenai kepuasan dan kesuksesan organisasi yang dapat dicapai melalui maksimalisasi *utilitas principals* dan manajemen. Salah satu cara pencapaian kesuksesan pemerintahan dapat dilihat dari terciptanya laporan keuangan secara jelas dan rinci yang sesuai dengan tujuan dari penerapan SISKEUDES dalam pembuatan laporan keuangan.

---

<sup>47</sup> Sri Ayem, “Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kebumen).”

<sup>48</sup> Ulfatus Zuhroh, “Pengaruh Kompetensi Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang,” *Jurnal Sustainable* 01, no. 2 (2021).

<sup>49</sup> Moh Sholeh, “Pengaruh Kompetensi Akuntansi Pegawai Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang),” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2017): 17.

Aplikasi SISKEUDES dapat digunakan mulai dari tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sistem keuangan yang baik dibutuhkan guna meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Dengan penggunaan sistem yang baik dapat memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan mencegah dari adanya kecurangan.

Sistem ini dapat membantu aparat desa terutama bidang keuangan untuk dapat menyusun berbagai dokumen penata usahaan keuangan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Antonius Sahaduta Hamanay bahwa “penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa”. Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Zizar Wiet Rifandi bahwa “Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa”.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan maka dirumuskan hipotesis:

**H2: Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berpengaru Positif Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Desa.**

### **3. Pengaruh Keikutsertaan Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan**

Berdasarkan teori *stewardship, model of man* didasarkan pada pegawai yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasinya. Selain itu organisasi yang melakukan pelatihan kepada pegawainya guna mendukung kinerja yang lebih profesional akan dapat meningkatkan kualitas organisasi. Mengingat minimnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah desa maka salah satu hal yang dibutuhkan adalah dengan adanya pelatihan pembuatan laporan keuangan yang dapat diikuti oleh perangkat desa terutama bagian keuangan.<sup>50</sup> Hal tersebut tentunya akan sangat membantu pemahaman mengenai

---

<sup>50</sup> Gurning et al., “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Di Desa Wisata Kecamatan Hariara Pohan, Samosir.”

proses pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Selain itu dengan adanya pelatihan diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi perangkat desa untuk dapat menjalankan tugas-tugas pokoknya dengan baik. Pemerintah juga perlu untuk dapat memahami konsep dan karakteristik laporan keuangan yang ada melalui keikutsertaan meraka mengikuti pelatihan.<sup>51</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kadek Ayu Indrayani dan Desek Nyoman Werastitu bahwa “kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan desa”.<sup>52</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alvina Ghina Riyanita dan Hajanti Widiastuti menyatakan bahwa “variabel pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa”.<sup>53</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan maka dirumuskan hipotesisi:

### **H3: Keikutsertaan Pelatihan Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Desa.**

---

<sup>51</sup> Budiarti et al., “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) Effect.”

<sup>52</sup> kadek Ayu Indrayani, “Pengaruh Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Desa.”

<sup>53</sup> Riyanita and Widiastuti, “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kabupaten Sleman).”